

**ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**ELSA DEVI KOMALASARI**

**1551010040**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H /2019 M**

## ABSTRAK

Pariwisata secara bahasa yaitu pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan. Pariwisata Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu melalui pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak akomodasi. Dalam pandangan Islam, sumber pendapatan melalui pajak sendiri tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, yang mengatur pajak secara langsung. UU nomor 9 Tahun 1990 dan UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapat daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut.

Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung? Dan bagaimana pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung menurut Ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengembangan sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan bagaimana pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perspektif Ekonomi Islam di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian lapangan tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata Kota Bandar Lampung pemerintah yang berkaitan mempunyai program-program guna mencapai tujuan pengembangan pariwisata yaitu Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi wisata di Kota Bandar Lampung dan Meningkatkan pengembangan industri dan pemasaran wisata melalui kreatifitas seni dan budaya yaitu Pelestarian Satwa Objek Wisata, Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Pelaksanaan promosi wisata dalam negeri, Pengembangan SDM Profesional Pariwisata dan program-program lainnya. Pariwisata Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu melalui pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak akomodasi. Dalam pandangan islam, sumber pendapatan melalui pajak sendiri tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, yang mengatur pajak secara langsung.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Ekonomi Islam





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Leikol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri  
Raden Intan, Sukarampe, Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi :

**Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas  
Pariwisata Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa :  
NPM :

**Elsa Devi Komalasari  
1551010040**

Program Studi :  
Fakultas :

**Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

Bandar Lampung, 01 Oktober

2019

**Pembimbing I**

**Dr. Nasruddin., M.Ag.  
NIP. 195809241990031003**

**Pembimbing II**

**A. Zulfansyah, S.Si, M.M.  
NIP. 198302222009121003**

**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.S.I.  
NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarampe, Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul: **Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung), Oleh Elsa Devi Komalasari, NPM. 1551010040, Jurusan: EKONOMI SYARIAH, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 08 November 2019.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. H. Ahmad Isnaeni, MAg (.....)**

**Sekretaris : Dinda Fali Rifan, M.Ak (.....)**

**Penguji I : M. Kurniawan, S.E, M.E.Sy (.....)**

**Penguji II : Dr. H. Nasruddin, M. Ag (.....)**

**Dekan,**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I  
NIP. 19800801 200312 1 001**



## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan.” (Al-Mulk ayat 15)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan dari lubuk hati penulis yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Adi Suprpto dan Ibu Amini Esnenia. Yang sangat saya cintai, hormati dan saya banggakan. Terimakasih yang tiada terhingga telah senantiasa memberikan saya kasih sayang, doa yang tulus dan ikhlas, serta memberikan saya segala dukungan selama ini baik *support* moril maupun *support* materil. Sehingga bisa membangkitkan rasa semangat saya agar selalu kuat, tabah dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang saya impikan. Semoga Allah SWT memuliakan Ayahanda dan Ibunda baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kakak saya Vika Desy Ratnasari, kakak ipar saya Pujiyanto dan ponakan tercinta Ardan Aditya Pratama yang sangat saya sayangi. Terimakasih telah menjadi salah satu motivasi dan semangat saya dalam menuntut ilmu.
3. Adik saya Renaldo Adhe Prayoga yang sangat saya sayangi. Terimakasih telah senantiasa memberikan saya semangat dan mendoakan kesuksesan saya dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.
4. Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah tempat saya menuntut ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Elsa Devi Komalasari dilahirkan di Banjar Ketapang, pada tanggal 09 Desember 1996 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Adi Suprpto dan Ibu Amini Esnenia.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 02 Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 02 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2019

Penulis

Elsa Devi Komalasari

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan dan persyarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (SI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini taklupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



3. Bapak Dr. Nasruddin, M.Ag. selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak A. Zuliyansyah, S.Si., M.M., selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak disebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal soleh dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2019

Penulis

Elsa Devi Komalasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI .....	24
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	24
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	24
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25
B. Pariwisata .....	34
1. Pengertian Pariwisata .....	34
2. Jenis-Jenis Wisata .....	37
3. Peran Wisata.....	39
4. Indikator Keberhasilan Pariwisata .....	42
5. Tujuan Pariwisata.....	43
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pariwisata .....	44
7. Pariwisata Menurut Ekonomi Islam .....	47



8. Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	52
C. Tinjauan Pustaka .....	57
D. Hubungan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	61
E. Kerangka Pikir .....	63
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	64
1. Sejarah Kota Bandar Lampung .....	64
2. Letak Geografis, Luas Wilayah Dan Batas Wilayah Kota Bandar Lampung .....	66
3. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	67
B. Objek Wisata Kota Bandar Lampung .....	70
1. Jumlah Objek Wisata Kota Bandar Lampung .....	70
2. Potensi Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	71
C. PAD Kota Bandar Lampung Dari Sektor Pariwisata .....	77
D. Pengembangan Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	81
1. Program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung .....	81
2. Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata .....	82
3. Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	83
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>85</b>
A. Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	85
B. Pariwisata Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung 2015-2017 .....	
Tabel 2 Jumlah Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung 2018 .....	
Tabel 3 Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari Sektor Pariwisata 2019.....	
Tabel 4 Objek dan Daya Tarik Wisata di Kota Bandar Lampung .....	
Tabel 5 Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Batu Putuk Kota Bandar Lampung .....	
Tabel 6 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung .....	
Tabel 7 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD .....	
Tabel 8 Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung.....	
Tabel 9 Tujuan Dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Dalam Pengembangan Pariwisata.....	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pariwisata Bandar Lampung)”**. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. **Pengembangan** adalah proses, cara, perbuatan menjadikan maju atau secara pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke

---

<sup>1</sup> Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65.

sasaran yang dikehendaki.<sup>2</sup> Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan objek wisata Bandar Lampung agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

**3. Pariwisata** yaitu istilah yang terlahir dari bahasa sansekerta yang dirangkai menjadi satu kata yakni, pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.<sup>3</sup>

**4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>4</sup>

**5. Perspektif** adalah suatu kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)*<https://www.kbbi.web.id>, diakses pada 9 April 2019.

<sup>3</sup> Pendit Nyoman, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2002), h. 63.

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 51-52.



seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.<sup>5</sup>

6. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah sebuah kajian mengenai pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatn asli daerah (PAD) perspektif ekonomi islam pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Obyektif

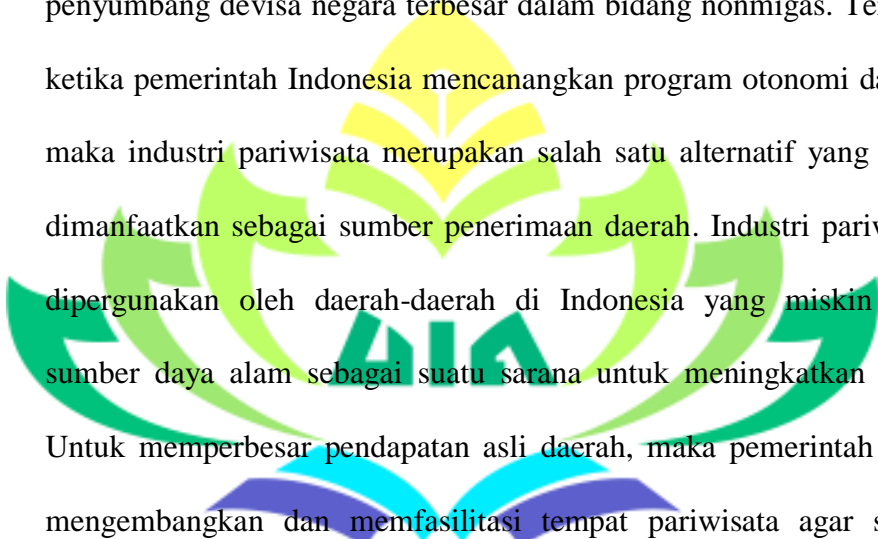
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Selain dari pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata terbesar didapat dari pajak hotel kemudian pajak hiburan dan pajak restoran. Dari jenis pendapatan daerah pajak hotel dan pajak

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1062.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)* <https://www.kbbi.web.id/usaha>, diakses pada 9 april 2019.

hiburan realisasi yang didapatkan memenuhi target yang diharapkan. Untuk pajak hotel diketahui target sebesar 22.500.000.000 dengan realisasi 27.229.417.356 dan untuk pajak hiburan target 21.000.000.000 dengan realisasi 23.040.582.556. Sedangkan untuk pajak restoran belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu target 60.000.000.000 dengan realisasi 52.594.470.805.



Sektor pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana untuk meningkatkan PAD. Untuk memperbesar pendapatan asli daerah, maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Lampung yang memiliki banyak obyek wisata unggulan yang dijadikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Alasan Subyektif

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literature yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### C. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Definisi lain PAD adalah sebagai sumber pembiayaan penerimaan daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>8</sup> Pendapat lain mengemukakan bahwa PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>9</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di Indonesia*,....h. 51.

<sup>8</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 235.

<sup>9</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 36.



diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Penyerahan pengelolaan pemerintah dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian wewenang dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah.<sup>10</sup>

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing.<sup>11</sup> Kemampuan keuangan daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang kemandirian bagi daerah maka pemerintah daerah diberi

---

<sup>10</sup> Tiara Apriani Jessy, *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata*, Jurnal Administrasi Negara Vol.5 No.3, h. 1604.

<sup>11</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah tersebut berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta daerah diberikan diskresi untuk menetapkan tarif sesuai kemampuannya.<sup>12</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor perdagangan.<sup>13</sup> Terkhusus untuk sektor pariwisata sangat besar potensi yang dapat digali dan dikembangkan, mengingat hampir diseluruh daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata masing-masing.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan dalam rangka penguatan perekonomian daerah provinsi Lampung. Di provinsi Lampung sendiri terdapat banyak kabupaten yang memiliki sektor pariwisata potensial. Diantaranya, kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Bandar Lampung. Terkait dengan hal tersebut, upaya pembangunan yang

---

<sup>12</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obir Indonesia, 2018), h. 9.

<sup>13</sup> Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefanus Pani Rengu, *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, h. 326.

berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan perlu terus mendapat perhatian dari pemerintah. Keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keamanan wilayah, sarana dan prasarana wisata, bahkan juga dipengaruhi oleh situasi global. Kondisi yang tidak kondusif secara langsung akan berpengaruh terhadap banyaknya kunjungan wisatawan masuk ke provinsi ini, baik wisatawan dari dalam negeri (wisatawan nusantara) maupun wisatawan dari luar negeri (wisatawan mancanegara).<sup>14</sup>

Alasan mengapa pariwisata harus dikembangkan adalah karena meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh dari pengembangan pariwisata tampak lebih nyata, seperti membuka lapangan pekerjaan bidang kuliner, penyediaan souvenir, *tourguide* dan lain-lain. Selain itu, adanya belanja wisatawan di daerah wisata akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dan juga potensi pariwisata di Indonesia yang dimiliki hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu Lampung yang memiliki keunikan adat istiadat yang unik, peninggalan sejarah, daerah yang berbukit dan dataran rendah dekat dengan pantai yang semuanya dapat dijadikan destinasi pariwisata yang nantinya akan menghasilkan pajak dari destinasi tersebut yang menjadi salah satu sumber PAD.

Lampung merupakan sebuah provinsi yang berada diujung timur pulau Sumatera. Provinsi Lampung menyimpan sejuta pesona alam yang menakjubkan, mulai dari wisata alam, tempat bersejarah, pantai, dan air

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Lampung, *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2017*, (Lampung: Badan Pusat Statistik), h. 39.



terjun yang memanjakan mata. Selama ini Lampung etrkenal dengan penghasil kopi dan lada, namun ternyata provinsi ini juga memiliki banyak tempat-tempat wisata yang tak kalah dengan wisata di kota besar lainnya. Salah satu kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata adalah Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Lampung yang memiliki banyak objek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata karena didukung topografi tinggi berbukit dan dataran rendah dekat dengan pantai yang diarahkan sebagai kawasan pendukung pariwisata.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dinaspariwisata.lampungprov.go.id diakses pada 25 Januari 2019 pukul 19.45 WIB

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bandar Lampung 2015-2017**

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Persentase
<b>Pajak Daerah</b>			
2015	443.719.360.000	258.454.662.346	58,25
2016	519.869.360.000	324.667.322.49,99	62,45
2017	551.869.360.000	373.764.303.246,73	67,73
<b>Retribusi Daerah</b>			
2015	86.694.131.500	46.682.837.194	53,85
2016	85.694.131.500	49.653.325.819	57,94
2017	81.902.732.800	28.256.993.503	34,50
<b>Laba BUMD</b>			
2015	10.476.622.932,46	11.249.897.883,27	107,38
2016	10.938.000.000	10.886.472.354,14	99,53
2017	12.938.000.000	13.062.931.623,62	100,97
<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>			
2015	228.218.028.173,78	81.159.929.433,12	35,56
2016	141.243.696.487,05	98.172.277.364,71	69,51
2017	348.085.603.800,00	197.725.452.250,52	56,80

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung dalam angka, 2018

Tabel tersebut merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 2015-2017 yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dari Pajak Daerah persentase tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 67,73% sebesar Rp. 373.764.303.246,73 dari target Rp 551.869.360.000. Pada Retribusi Daerah pendapatan tertinggi yaitu pada

tahun 2016 57,94% sebesar Rp.49.653.325.819 dari target Rp. 85.694.131.500. Pada Laba BUMD teringgi pada tahun 2015 107,38% sebesar Rp 11.249.897.883,27 dari target Rp 10.476.622.932,46. Dan pada lain-lain PAD yang Sah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 69,51% sebesar Rp. 98.172.277.364,71 dari target Rp.141.243.696.487,05. Ditiap tahunnya masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah menyumbang pendapatan yang tidak menentu untuk daerah. Dan rata-rata sumber pendapatan daerah belum mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kepariwisataan secara lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan aspek potensi daerah (keragaman budaya, seni sumber daya alam dan sumber daya manusia).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021, h.7.



Terdapat 54 obyek wisata di Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola secara mandiri (swasta).

**Tabel 2**  
**Jumlah Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Jenis Wisata	Jumlah
1.	Wisata Alam	22
2.	Wisata Budaya	12
3.	Wisata Buatan	20
Total		54

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi wisata baik itu wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatan yang dapat terus dikembangkan guna menyumbang Pendapatan Daerah yang lebih besar. Bandar Lampung memiliki 54 destinasi pariwisata yang semuanya sangat potensial untuk terus dikembangkan. Diantaranya yaitu wisata alam unggulan seperti Taman Wisata Lembah Hijau (panorama alam, outbond, dan waterboom), Wira Garden (panorama alam), Camp 91 Kedaung (outbond, dan masih banyak lagi wisata alam yang lainnya. Selanjutnya wisata budaya seperti Kelanteng Vihara Thay Hin Bio (bangunan peribadatan umat Budha), Museum Lampung Ruwa Jurai (museum koleksi hasil kebudayaan umat lampung), Rumah Adat Lampung Dalom Olok Gading (arsitektur tradisional lampung) dan masih banyak wisata budaya lainnya. Kota Bandar Lampung juga memiliki wisata buatan yang potensial diantaranya Puncak Mas, Taman Rekreasi Tirtayasa, Waterboom Citra Garden, dan

berbagai macam pusat perbelanjaan (Mall Kartini, Central Plaza, Plaza Lotus, dan lain sebagainya).<sup>17</sup>

Dalam Al-qur'an kepariwisataan juga dijelaskan bahwa perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan pencipta alam semesta ini.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am 6 : 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Artinya: *"Katakanlah: Berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"*.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berjalan-jalan dimuka bumi (berpariwisata), untuk memperhatikan ciptaanNya dan mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang dilakukan, yaitu tidak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan segala ciptaanNya yang ada dimuka bumi. Berpariwisata juga merupakan bentuk mengagumi keindahan dan mensyukuri yang telah Allah ciptakan dimuka bumi.

Dalam Al-qur'an sendiri menekankan perlu adanya jaminan keamanan suatu daerah atau negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Saba' 34 : 18:

---

<sup>17</sup> Ibid., h. 51-52.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهَرَ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman”.

Dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya yang dilimpahi keberkatan, keindahan, sehingga dianjurkan bagi manusia untuk melakukan perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyamanan, keberagaman dengan rasa aman, perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu kehaarusan untuk memahami dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan pencipta alam semesta.

Dapat diketahui kontribusi dari sektor pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari Sektor Pariwisata**

Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pajak Hotel	22.500.000.000	27.229.417.356	121%
Pajak Restoran	60.000.000.000	52.594.470.805	88%
Pajak Hiburan	21.000.000.000	23.040.582.556	110%

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2019



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat baik dalam menyumbang Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata rata-rata mampu mencapai target yang telah ditentukan. Untuk itu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan guna menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar lagi. Dari jenis pendapatan daerah pajak hotel dan pajak hiburan realisasi yang didapatkan memenuhi target yang diharapkan. Untuk pajak hotel diketahui target sebesar 22.500.000.000 dengan realisasi 27.229.417.356 dan untuk pajak hiburan target 21.000.000.000 dengan realisasi 23.040.582.556. Sedangkan untuk pajak restoran belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu target 60.000.000.000 dengan realisasi 52.594.470.805. Maka, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terbesar di dapat dari pajak hotel, kemudian pajak hiburan, dan yang terakhir pajak restoran.

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 52.

#### **D. Batasan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis menetapkan batasan masalah pada pengembangan sektor pariwisata bidang pengembangan destinasi wisata di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif Ekonomi Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengembangan sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung menurut Islam?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengembangan sektor pariwisata di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perspektif Ekonomi Islam di Bandar Lampung.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menambah khasanah pengetahuan tentang pengembangan sektor pariwisata.
- 2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti: untuk menambah wawasan tentang pengembangan sektor pariwisata.
- 2) Bagi Akademik: sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam kepariwisataan dan perkembangannya, bagi instansi kepariwisataan diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dalam pariwisata di Kota Bandar Lampung mengenai perkembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

**G. Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.<sup>19</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian lapangan tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Secara lengkap dapat dijelaskan jenis penelitian:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di luar kepustakaan.<sup>20</sup> Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, pihak terkait kepemilikan destinasi wisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), h.1-3.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literaturnatau bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring kedalam kerangka pemikiran teoritis. Dalam penelitian ini penelitian library research dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur, seperti buku tentang kepariwisataan, ekonomi daerah, ekonomi islam, Al-qur'an dan Hadits serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang bagaimana pengembangan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7.



## 2. Sumber Data

### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, pemilik destinasi wisata (pihak terkait), dan masyarakat sekitar destinasi wisata.

### b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan seperti, literatur, buku-buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel.<sup>23</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

---

<sup>22</sup> Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 146.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 147.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung, dalam artian peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.<sup>24</sup> Dimana peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di pariwisata Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis langsung melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Disini penulis melakukan wawancara (*interview*) kepada kepala bidang pengembangan pariwisata, pihak swasta pemilik destinasi wisata dan beberapa masyarakat sekitar destinasi wisata guna memperoleh data terkait pengembangan sektor pariwisata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 145.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 240.

sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Pengelolaan Data

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.<sup>26</sup> Karena dalam proses *editing* mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

##### b. Sistematika Data (*Systematizing*)

*Systematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup> Data yang dikumpulkan peneliti akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), h. 134.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 135.

Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan treats*). Analisis SWOT yaitu suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara etimologis pendapatan berasal dari kata “dapat” yang berarti diperoleh, kena, beroleh. Jadi pendapatan adalah hasil pencaharian atau usaha yang diperoleh seseorang dalam sehari atau sebulan.

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain: a. Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara, b. Pendapatan disposibel, yaitu: pendapatan yang dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel, c.



Pendapatan nasional, yaitu: nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara.<sup>28</sup>

Menurut Carunia Mulya Firdausy, PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Semakin besar PAD suatu daerah, maka daerah akan semakin baik dalam menjamin ketersediaan pembiayaan pembangunan daerahnya.<sup>29</sup>

Definisi lain, PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>30</sup> Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapat daerah dari pajak daerah,

---

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47.

<sup>29</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*,.... h. 48.

<sup>30</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 235.

<sup>31</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011), h. 99.

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut.

## 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>32</sup> APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dari:

### a. Pajak Daerah

Adriani mendefinisikan pajak dengan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 382.

<sup>33</sup> Murtadho Ridwan, *Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF Vol. 1 No. 01, Juni 2015, h. 125.

Rochmat Soemitro berpendapat sama seperti Adriani bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yangm digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu definisi tersebut dikoreksi sehingga ia mendefinisikan pajak dengan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.<sup>34</sup>

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>35</sup>

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 126.

<sup>35</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*,.... h. 21.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>36</sup> Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Lin-lain

Berdasarkan jenis pajak, kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan, apabila potensin didaerah kabupaten atau kota tersebut dipanjang kurang memadai. Menurut Tjahya Supriatna, penetapan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 383.

pajak daerah sebisa mungkin memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.<sup>37</sup>

- 1) Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan ongkos pungut yang serendah mungkin, hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis sebisa mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan sebagainya.
- 2) Keadilan, baik keadilan horizontal, vertikal maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas.
- 3) Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen, misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor komoditas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.

---

<sup>37</sup> Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h. 195.



- 4) Kemampuan Administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administratif yang ada, dengan kemampuan tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran, dan perangkat administrasi yang memadai.
- 5) Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis dan pengenaan pajak yang tumpang tindih sebisa mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Contohnya: pungutan pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan PBB.
- 6) Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan rakyat.<sup>38</sup> Definisi dari retribusi daerah lainnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

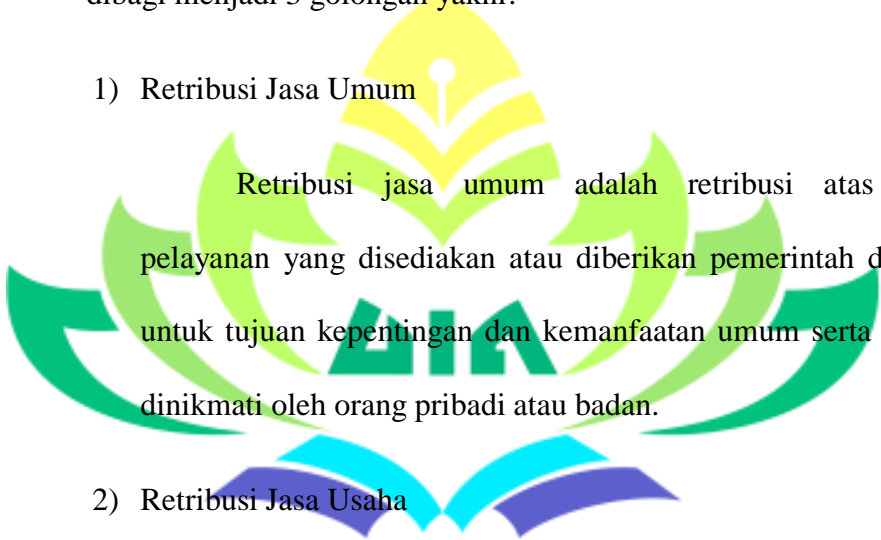
---

<sup>38</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*,.... h. 22.

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yakni retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>40</sup> Retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan yakni:

1) Retribusi Jasa Umum



Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yakni jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> UU Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi, (Jakarta: Fokus Media, 2009), h. 4.

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelola adalah kesatuan produkti untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.<sup>41</sup>

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 195.

<sup>42</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- e. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 4 antara lain penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan asset daerah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 25.

## B. Pariwisata

### 1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta, yang komponen-komponennya terdiri dari kata “*pari*” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, “*wis(man)*” yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, dan “*ata*” berarti pergi terus menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata yang melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan.<sup>44</sup>

Organisasi pariwisata didunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari selama satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut. Menurut Hunzieker dan Krapf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>45</sup>

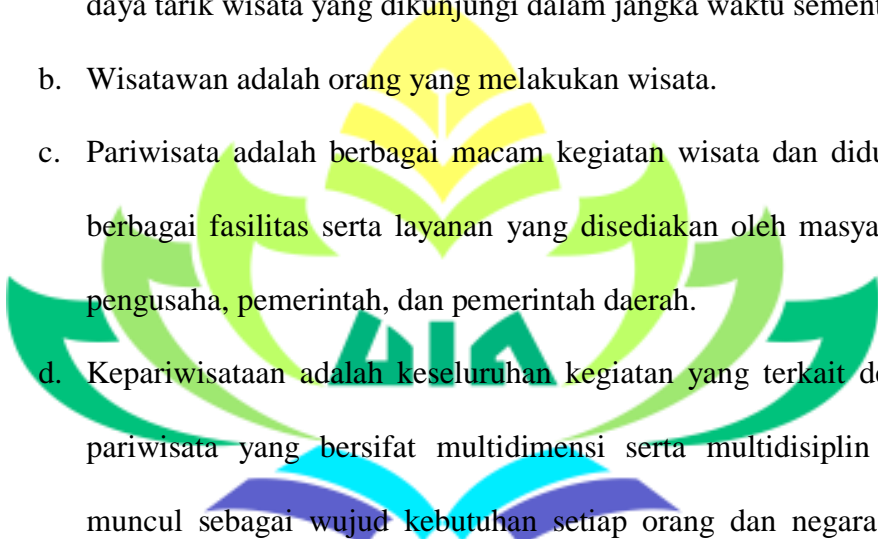
---

<sup>44</sup> Pendit Nyoman, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2002), h. 3.

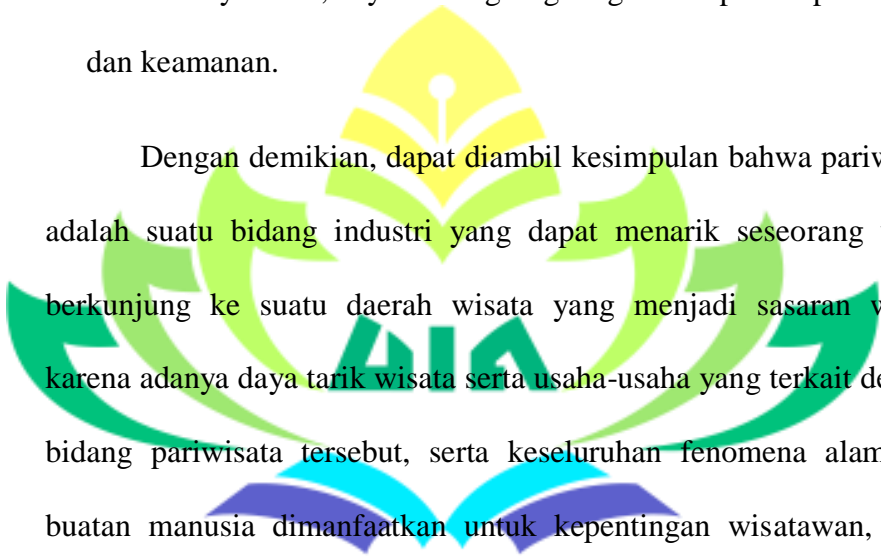
<sup>45</sup> M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30.



Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut:

- 
- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
  - b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
  - c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
  - d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
  - e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  - f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.



Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan dalam rangka penguatan perekonomian daerah. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan daerah wisata dengan kata lain pengembangan yang dilakukan tidak bisa hanya sembarangan saja, harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik yaitu:<sup>46</sup>

- a. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan.
- b. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah.
- c. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cendramata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya.
- d. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang viral seperti toilet, tempat parkir, tempat makan dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung, bukan itu saja tetapi bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang memadai untuk pengunjung.

## 2. Jenis-jenis Wisata

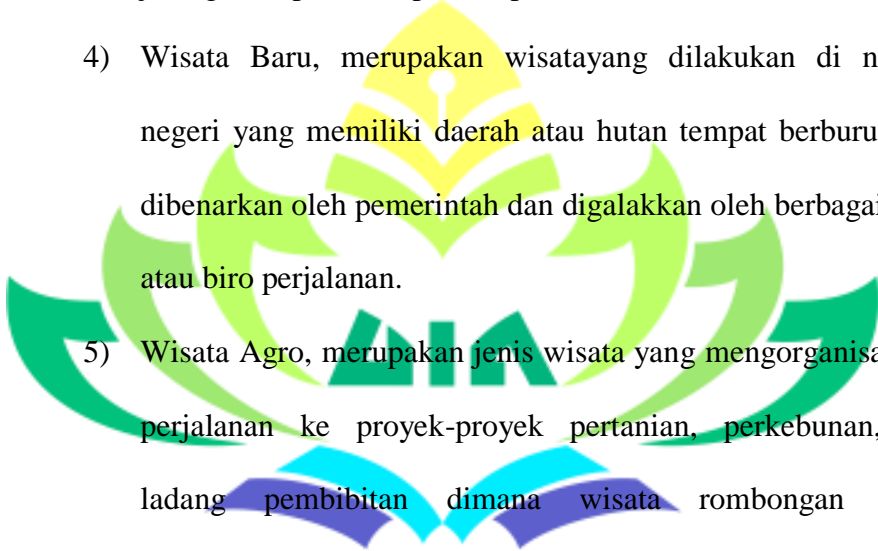
Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Wisata Alam, yang terdiri dari:
  - 1) Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

---

<sup>46</sup> H. Oka. A. Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, (Jakarta: Pertja, 1999), h. 66.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

- 
- 2) Wisata Etnik (Etnik Tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
  - 3) Wisata Cagar Alam (Ecotourism), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.
  - 4) Wisata Baru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
  - 5) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya.

b. Wisata Sosial Budaya, yang terdiri dari:

- 1) Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya, seperti tempat bekas

pertempuran (battle field) yang merupakan daya tarik wisata utama dibanyak negara.

- 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, maaupun dengan tema khusus lainnya.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pariwisata

Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh kuatnya faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*). Faktor pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Faktor pendorong umumnya bersifat sosio-psikologis sedangkan faktor penarik merupakan *destination-specific attributes*.

Ryan menjelaskan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata antara lain sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Escape*. Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.

---

<sup>48</sup> M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Ibid.*, h. 57-58.

- b. *Relaxation*. Keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi untuk *escape*.
- c. *Play*. Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan yang merupakan permunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan serius.
- d. *Strengthening Family Bonds*. Ingin memperat hubungan kekerabatan. Keakraban hubungan kekerabatan ini juga terjadi diantara anggota keluarga yang melakukan perjalanan bersama-sama, karena kebersamaan sangat sulit diperoleh dalam suasana kerja sehari-hari di negara industry.
- e. *Prestige*. Untuk menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau derajat sosial.
- f. *Social Interaction*. Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.
- g. *Romance*. Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis.
- h. *Educational Opportunity*. Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari orang lain dan/atau daerah lain atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong yang dominan dalam pariwisata.



- i. *Self-fulfillment*. Keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.
- j. *Wish-fulfillment*. Keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi, yang lama dicita-citakan sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat agar bisa melakukan perjalanan.

Sedangkan faktor penarik seseorang untuk melakukan perjalanan wisata menurut Jackson antara lain:<sup>49</sup>

- a. *Location climate*
- b. *National promotion*
- c. *Retail advertising*
- d. *Wholesale marketing*
- e. *Special events*
- f. *Incentive schemes*
- g. *Visiting friends*
- h. *Visiting relatives*
- i. *Tourism attractions*
- j. *Culture*
- k. *Natural environment and man-made environment.*

#### **4. Pariwisata menurut Ekonomi Islam**

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah islam. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat muslim harus ber-islam dimanapun dan kapanpun.<sup>50</sup>

Menurut Sofyan, definisi wisata halal lebih lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai halal islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO) konsumen wisata halal bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Dijelaskan oleh Sofyan bahwa kriteria umum pariwisata halal yaitu:

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusyrikan dan khufarat.

---

<sup>50</sup> Haidar Tsany Alim, Dkk., *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, Semarang, h.2.

- d. Menghindari maksiat.
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>51</sup>

Dalam kajian islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu<sup>52</sup>:

a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan obyek wisata rohani.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya, manusia bisa mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, pengetahuan Sang Pencipta. Kemudian dia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam.

Dalam surat Al-Ankabut ayat 20 Allah meminta agar kita merenungi keindahan ciptaan nan agung Allah SWT agar dijadikan

---

<sup>51</sup> Yudi Martha Nugraha, *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing di Kepulauan Riau*, h. 65.

<sup>52</sup> Humaidi Al Ayubi H, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani*, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008, h.3.

sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup manusia.<sup>53</sup>

Artinya: *Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al Ankabut: 20)*<sup>54</sup>

Ketika Allah menyebut “berjalanlah dimuka bumi” artinya Allah mengingatkan kita kepada alam ciptaan Allah, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam ini dengan kekhasan yang berbeda.

Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma'ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan negara, syar'i terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran

---

<sup>53</sup> Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Alquran)*, Jurnal Human Falah, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 141.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015), h. 398

harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan didunia dan diakhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam islam haruslah sejalan dan sesuai dengan syariat islam yang dapat membuat semua golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan hanya didunia tapi juga diakhirat.<sup>55</sup>

Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT.

Menurut Chukaew terdapat 8 faktor standar pengukuran pariwisata syariah yaitu:<sup>56</sup>

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan Islam.
- d. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.

---

<sup>55</sup> M. Hanbali, Tujuan Ekonomi Islam. Dialetika, 2013. <http://marx83.wordpress.com/2008/11/30/tujuan-ekonomi-islam-2/>, diakses pada 23 April 2019.

<sup>56</sup> Yudi Martha Nugraha, *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing di Kepulauan Riau*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p) : 0853-7720, ISSN (e): 2541-4275, h. 64.

- e. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- f. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- g. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan islam.

Dari karakteristik pariwisata yang dijabarkan oleh Chukaew terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang pariwisata syariah, yaitu:

- a. Lokasi, penerapansistem islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan dalam kaidah islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi, penerapan sistem. Seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat islam dan terjagaanya kenyamanan wisatawan.
- c. Konsumsi. Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal ini tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 3. Yang dimaksud dari segi kehalalannya yaitu baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengelolaannya.
- d. Hotel, seluruh proses kerja dan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah.<sup>57</sup>

## **5. Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 65.



Menurut terminologi dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat terbentuk apabila ada pelaku wisata (*demand*) yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan objek wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan sistem promosi dan pemasaran yang baik serta pelayanan terhadap para pelaku wisata (*supply*). Terkait dengan Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Nuryanti, pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching and adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan.<sup>58</sup>

Sebuah destinasi akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam pariwisata berkelanjutan adalah:

---

<sup>58</sup> Heri Tjahjono, *Analisis Potensi dan Masalah Pariwisata di Kelurahan Kandri*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 37, No 2 Desember 2010, h. 162.

- a. *Ecology Sustainability*, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumberdaya ekologi yang ada.
- b. *Social and Cultural Sustainability*, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
- c. *Economic Sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumberdaya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.<sup>59</sup>

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam. Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan

---

<sup>59</sup> Marceilla Hidayat, *Strategi Perencanaan Pengembangan Objek Wisata*, Tourism and Hospitality Essentials (THE) journal, Vol. 1, No. 1, 201, h. 37.

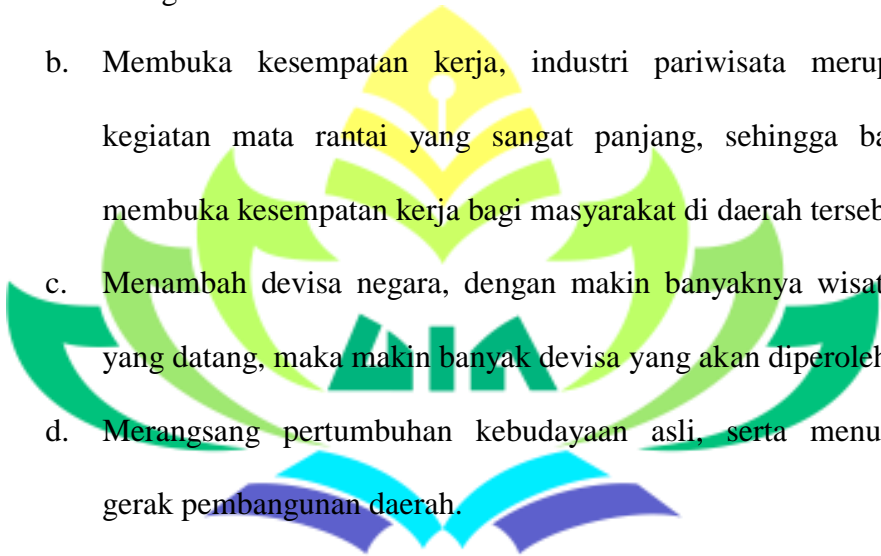
kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata juga menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan daerah, oleh karenanya membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Menurut Pendit, industri pariwisata harus ditegakkan diatas landasan prinsip-prinsip dasar yang nyata disebut dasar unsur atau dasasila yang meliputi politik, pemerintahan, perasaan ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi serta kesempatan berbelanja.<sup>60</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah:

---

<sup>60</sup> Pendit Nyoman, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradya Paramiata, 2002), h. 11.

- 
- a. Menambah pemasukan dan pendapatan baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan.
  - b. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
  - c. Menambah devisa negara, dengan makin banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh.
  - d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

Industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah adalah suatu langkah jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana untuk meningkatkan PAD.

Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan. Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor yang sesuai faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khusus dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi pebandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari, untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian:

1. Bambang Suhada dan Superda A. Masyono dengan judul “Strategi Pengembangan Sektor Kepariwisata di Kabupaten Lampung Timur”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa objek wisata unggulan di Kabupaten Lampung Timur adalah Objek Wisata Taman Nasional Way Kambas ranking 1, Objek Wisata Balai Benih Induk Holtikultural ranking 2 dan Taman Purbakala Pugung Raharjo ranking 3.

Hasil dari analisis tersebut adalah Strategi Pengembangan Objek wisata Unggulan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Melakukan Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) atau pihak keswadayaan masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan aksesibilitas eksternal kawasan agar tingkat pencapaian objek daya tarik wisata mudah dijangkau oleh wisatawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM agar pengelolaan objek daya tarik wisata lebih optimal, pengembangan fasilitas penunjang mengingat proporsi penggunaan lahan non terbangun masih besar, hal tersebut diatur oleh kebijakan pengembangan, dan pengembangan pemasaran investasi dan pemasaran wisata.<sup>61</sup>

2. Novi Dwi Purwanti dan Retno Mustika Dewi dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013”. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat

---

<sup>61</sup>Bambang Suhada dan Superda A.Masyono, *Strategi Pengembangan Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Lampung Timur*, ISSN Cetak 1978 – 6573/ ISSN Online: 2477 - 300x DERIVATIF Vol. 9 No. 1, April 2015, h. 129.



disampaikan adalah bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>62</sup>

3. Rezi Kurnia Putri dengan judul “Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sudah berjalan dengan baik, karena pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata saja, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor-sektor lain penyumbang pendapatan daerah. Kendala dalam melakukan pengembangan pariwisata oleh pemerintah Kota Bukittinggi ini adalah lahan yang terbatas karena luas Kota Bukittinggi yang kecil, dan juga masalah anggaran dari APBD yang terbatas dan anggaran tidak dicairkan pada awal bulan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Novi Dwi Purwanti dan Retno Mustika Dewi, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*, 2014.

<sup>63</sup>Rezi Kurnia Putri, *Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, April 2015.

4. Nur Indah Kurnia Sari dengan judul “Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif yang awalnya Rp 500 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp 1000 on 2011, hal ini juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi wisata religi Sunan Giri yang memberikan kontribusi sebesar 22,15% on District Own Local Revenue. Namun, pada tahun 2012 kontribusi menurun menjadi 18,71% yang disebabkan proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah meningkat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 20,89% dikarenakan naiknya jumlah pengunjung.<sup>64</sup>
5. Angga Pradikta dengan judul “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati.” Hasil penelitian menunjukkan dalam Matrix Grand Strategy terlihat posisi pengembangan sektor pariwisata di Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah berada di posisi Strategi Pertumbuhan, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dalam diagram menunjukkan bahwa titik potong(1,39;0,91) berada pada kuadran I, dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan Obyek Wisata Waduk

---

<sup>64</sup> Nur Indah Kurnia Sari, *Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik)*, 2014.

Gunungrowo Indah. Perolehan rata-rata kontribusi Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011 adalah 0,000136 %.<sup>65</sup>

#### **D. Hubungan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya.

UU nomor 9 Tahun 1990 dan UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya, dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah

---

<sup>65</sup> Angga Pradikta, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*, November 2013.

tersebut maka tenaga kerja akan banyak terserap dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>67</sup>

Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas sektor pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah, industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kerjasama sinergis antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Data BPPRD menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor pariwisata yaitu untuk pajak hotel diketahui target sebesar 22.500.000.000 dengan realisasi 27.229.417.356 dan untuk pajak hiburan

---

<sup>66</sup> Ni Luh Sili Antari, *Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Vol. 3 edisi Agustus 2013, h. 36-37.

<sup>67</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 52.

target 21.000.000.000 dengan realisasi 23.040.582.556. Sedangkan untuk pajak restoran belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu target 60.000.000.000 dengan realisasi 52.594.470.805. Maka, dari data diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terbesar di dapat dari pajak hotel, kemudian pajak hiburan, dan yang terakhir pajak restoran.

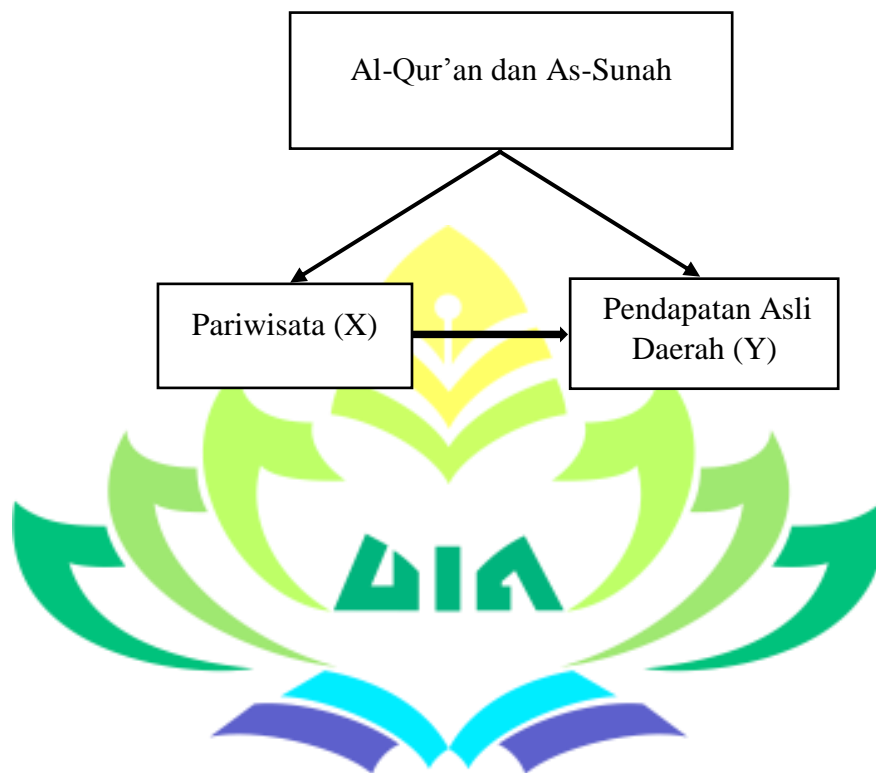
#### **E. Kerangka Pikir**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor perdagangan.

Data dari BPPDR Kota Bandar Lampung diatas dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat baik dalam menyumbang Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Diketahui bahwa pajak-pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata rata-rata mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam. Dalam Al-qur'an kepariwisataan dijelaskan bahwa perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil

pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan pencipta alam semesta (Al-An'am ayat 11). Dari teori diatas peneliti menentukan kerangka pikir sebagai berikut:





### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung**

###### **1. Sejarah Kota Bandar Lampung**

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang–Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk /1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

- a. Sumarsono Periode 1956-1957
- b. H. Zainal Abidin P.A Periode 1957-1963
- c. Alimudin Umar, SH Periode 1963-1969
- d. Drs.H.M.Thabrani Daud Periode 1969-1976
- e. Drs. H. Fauzi Saleh Periode 1976-1981
- f. Drs.H.Zulkarnain Subing Periode 1981-1986

- g. Drs.H.A Nurdin Muhayat Periode 1986-1995
- h. Drs. H. Suharto Periode 1996- 2006
- i. Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd. Periode 2006-2010
- j. Drs. H. Herman HN, MM Periode 2010 s.d. Sekarang

## **2. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Wilayah Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Luas wilayah dan letak geografis kota bandar lampung Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat  $5^{\circ} 20'$  -  $5^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ}28'$  -  $105^{\circ}37'$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Pesawaran.
- d. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

### 3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah: “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. Dituangkan dalam Visi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.<sup>68</sup>

#### a. Visi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yaitu terwujudnya Kota Bandar Lampung sebagai kota berbudaya dan destinasi wisata. Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi:

- 1) Bandar Lampung: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- 2) Sehat: Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan

---

<sup>68</sup> RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021.

kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

- 3) Cerdas: Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- 4) Beriman: Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
- 5) Berbudaya: Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
- 6) Unggul: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- 7) Berdaya Saing: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- 8) Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola

sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

b. Misi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Misi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yaitu:

- 1) Pengembangan produk pariwisata berbasis MICE.
- 2) Peningkatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Wisata.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.
- 5) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah.
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

## **B. Objek Wisata Kota Bandar Lampung**

### **1. Jumlah Objek Wisata Kota Bandar Lampung**

**Tabel 4**  
**Jumlah Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Jenis Wisata</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Wisata Alam	22
2.	Wisata Budaya	12
3.	Wisata Buatan	20
Total		54

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi wisata baik itu wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatan yang dapat terus dikembangkan guna menyumbang Pendapatan Daerah yang lebih besar. Bandar Lampung memiliki 54 destinasi pariwisata yang semuanya sangat potensial untuk terus dikembangkan. Diantaranya yaitu wisata alam unggulan seperti Taman Wisata Lembah Hijau (panorama alam, outbond, dan waterboom), Wira Garden (panorama alam), Camp 91 Kedaung (outbond, dan msaih banyak lagi wisata alam yang lainnya. Selanjutnya wisata budaya seperti Kelanteng Vihara Thay Hin Bio (bangunan peribadatan umat Budha), Museum Lampung Ruwa Jurai (museum koleksi hasil kebudayaan umat lampung), Rumah Adat Lampung Dalom Olok Gading (arsitektur tradisional lampung) dan



masih banyak wisata budaya lainnya. Kota Bandar Lampung juga memiliki wisata buatan yang potensial diantaranya Puncak Mas, Taman Rekreasi Tirtayasa, Waterboom Citra Garden, dan berbagai macam pusat perbelanjaan (Mall Kartini, Central Plaza, Plaza Lotus, dan lain sebagainya).<sup>69</sup>

## 2. Potensi Pariwisata Kota Bandar Lampung

Potensi Kepariwisataan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Objek & Daya Tarik Wisata di Bandar Lampung**

Wisata Alam		
1	Teluk Lampung, Kec. Panjang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kec. Teluk Betung Timur.	Wisata Bahari Kota Bandar Lampung
2	Puncak Sukadanaham, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Pemandangan Kota Bandar Lampung
3	Hutan Raya Wan Abdurahman, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Kekayaan flora dan tanaman hutan
4	Objek Wisata Alam Batu Putu, Jl. Raya Batu Putu, Telukbetung Barat	Panorama alam dan Air Terjun
5	Taman Wisata Lembah Hijau	Panorama Alam, Outbond, Waterboom
6	Wira Garden	Panorama Alam
7	Pantai Duta Wisata, Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat	Panorama alam pantai
8	Pantai Puri Gading, Jl. Laks. Martadinata, Lempasing,	Panorama alam pantai, olahraga pantai (kano,

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 51-52.

	Telukbetung Barat	menyelam), rekreasi pantai
9	Pantai Tirtayasa, Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat	Panorama alam pantai dan rekreasi pantai
10	Pulau Kubur	Panorama alam
11	Pulau Pasaran	Panorama alam
12	Sumur Putri	Penorama alam
13	Taman Wisata Bumi Kedaton	Panorama alam dan atraksi hewan
14	Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De”Brow
15	Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
16	Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
17	Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Teluk Betung Selatan
18	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD ) Peninggalan Belanda	Di Teluk Betung Selatan
19	Stasiun Kereta Api Jl Kotaraja Tanjungkarang pusat	Peninggalan sejarah Belanda
20	Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
21	Gereja Marturia Jl Imam Bonjol Tanjung Karang	Peninggalan sejarah Belanda
22	Perkantoran PTPN VII, Kedaton Bandar Lampung	Peninggalan sejarah Belanda
<b>Wisata Budaya</b>		
1	Bunker Peninggalan Jepang	Jl. Amir Hamzah Teluk Betung

2	Goa Jajar	Jl. Juanda/Kesehatan Pahoman
3	Goa Cepit	Gunung Betung Tanjungkarang
4	Kelanteng Vihara Thay Hin Bio, Jl. Ikan Kakap, Telukbetung Selatan	Bangunan peribadatan umat Budha
5	Masjid Tua Al-Anwar, Jl. Laks. Mahayati, Telukbetung Selatan	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
6	Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
7	Monumen Krakatau (Taman Dipangga), Jl. W.R. Supratman, T.betung Utara	Monumen bersejarah dan taman
8	Museum Lampung “Ruwa Jurai”, Jl. Z.A. P. Alam Gedung Meneng	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
9	Anjungan Lampung, Way Halim	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat lima belas kabupaten/kota.
10	Rumah Adat Lampung Dalom Olok Gading, Jl. Basuki Rachmat, Telukbetung Utara	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
11	Taman Budaya, Jl. Cut Nyak Dien, Tanjungkarang Pusat	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
12	Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampung
<b>Wisata Buatan</b>		
1	Lapangan Golf, Jl. Endro Wiratmin, Sukarame	Kegiatan olah raga golf
2	Pasar Tradisional Bambu Kuning, Jl. Imam Bonjol, Tanjungkarang Pusat	Pasar kebutuhari sehari-hari dan kebutuhari lainnya

3	Central Plaza	Pusat perbelanjaan
4	Mall Kartini	Pusat perbelanjaan
5	Ramayana	Pusat perbelanjaan
6	Plaza Lotus	Pusat perbelanjaan
7	Simpur Center	Pusat perbelanjaan
8	Chandra Superstore	Pusat perbelanjaan
9	Mall Bumi Kedaton	Pusat perbelanjaan
10	Pusat Hiburan Malam (diskotik, <i>billyard centre</i> , karaoke)	Pusat hiburan malam di sepanjang pantai Teluk Lampung
11	Pusat Manisan Lampung, Jl. Ikan Kakap Telukbetung Utara	Oleh-oleh dan jajanan manisan
12	Taman Lesehan Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat	Tempat makan lesehan
13	Taman Santap Malam, Jl. Ikan Tongkol	Tempat makan
14	Taman Kupu-kupu	Tempat penangkaran kupu-kupu
15	Pelabuhan Panjang	TOL Laut
16	Water Boom Citra Garden	Permainan air , kolam renang
17	Puncak Mas	Jl Haji Hami RJP Sukadanaham Tanjungkarang Barat
18	Camp 91	Kemiling Bandar Lampung
19	Alung Pool	Kolam Renang
20	Taman Rekreasi Tirtayasa	Perumahan Tirtayasa

**Tabel 6**  
**Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata Batu Putu**  
**Kota Bandar Lampung**

No	Nama	Daya Tarik	Aktivitas Pengunjung
1	Puncak Sukadanaham, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Pemandangan Kota Bandar Lampung	Menikmati Panorama Alam dan Panorama Kota Bandar Lampung (Sky View City), Hiking.
2	Hutan Raya Wan Abdurahman, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Kekayaan flora dan tanaman hutan	Menikmati keindahan alam, Berkemah, dan Melakukan pengamatan terhadap keaneka ragaman flora dan fauna
3	Objek Wisata Air Terjun Batu Putu, Jl. Raya Batu Putu, Telukbetung Barat	Panorama alam dan Air Terjun	Menikmati Panorama Alam dan Pemandangan Kota Bandar Lampung, Berkemah.
4	Taman Wisata Bumi Kedaton	Panorama alam dan atraksi Hewan	Melihat beraneka satwa, Panorama Alam.
5	Wisata Lembah Hijau	Tempat rekreasi	Berenang, berkemah, memancing, menikmati buah-buahan lokal,

			permainan petualangan, beristirahat.
6	Taman Kupu- kupu	Tempat penangkaran kukupu	Menikmati keindahan alam, mengamati fauna kupu-kupu Sumatera serta beristirahat.
7	Lembah Durian, Kelurahan Kedaung	Menikmati buah durian,berkemah, istirahat,permainan petualangan.	Menikmati Buah Durian, Berkemah, dan beristirahat, permainan petualangan.
8	Kolam Pemancingan Yulli, Kedaung	Memancing,mema kan ikan	Memancing, melakukan penelitian ikan konsumsi.
9	Mata Air Panas, Kedaung	Menikmati panaorama alam	Menikmati Panorama Alam.
10	Taman Cibiah, Batu Putu	Berenang, suasana alam	Berenang, Makan di restoran, memancing, menikmati suasana alam perdesaan.
11	Simulasi Tempur 206	Bermain airsoft gun	Kegiatan permainan petualangan buatan, dan simulasi perang.

### C. PAD Kota Bandar Lampung Dari Sektor Pariwisata

**Tabel 7**

**Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung  
dari Sektor Pariwisata**

Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pajak Hotel	22.500.000.000	27.229.417.356	121%
Pajak Restoran	60.000.000.000	52.594.470.805	88%
Pajak Hiburan	21.000.000.000	23.040.582.556	110%

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2019

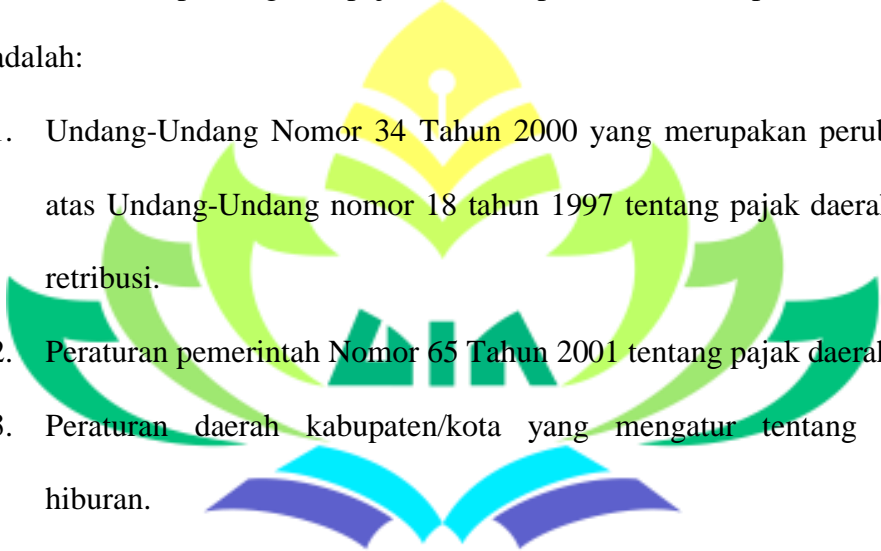
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat baik dalam menyumbang Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata rata-rata mampu mencapai target yang telah ditentukan. Untuk itu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan guna menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar lagi. Dari jenis pendapatan daerah pajak hotel dan pajak hiburan realisasi yang didapatkan memenuhi target yang diharapkan. Untuk pajak hotel diketahui target sebesar 22.500.000.000 dengan realisasi 27.229.417.356 dan untuk pajak hiburan target 21.000.000.000 dengan realisasi 23.040.582.556. Sedangkan untuk pajak restoran belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu target 60.000.000.000 dengan realisasi 52.594.470.805. Maka, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa



Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terbesar di dapat dari pajak hotel, kemudian pajak hiburan, dan yang terakhir pajak restoran.

Pajak hiburan itu sendiri adalah pajak penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat juga diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.<sup>70</sup>

Dasar hukum pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah:

- 
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi.
  2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
  3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hiburan.
  4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten atau kota yang dimaksud.<sup>71</sup>

Berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Pasal 18 Objek pajak hiburan adalah:

1. Tontonan film.
2. Pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana.

---

<sup>70</sup> Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.7.

<sup>71</sup> *Ibid.*

3. Kontes kecantikan, binagara dan sejenisnya.
4. Pameran dan pertunjukan termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata.
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
6. Sirkus, akrobat, dan sulap.
7. Permainan bilyard, golf, bowling.
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
10. Pertandingan olahraga.

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% dari harga tiket masuk.
2. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang) sebesar 20% dari harga tanda masuk.
3. Tontonan film, sebesar 20% dari harga tanda masuk.
4. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% dari harga tanda masuk.

5. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% dari harga tanda masuk.

**Tabel 8**  
**Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1.	2015	7.199.999.464	5.794.133.258	80,47	Cukup Efektif
2.	2016	7.700.000.000	6.962.370.443	90,42	Efektif
3.	2017	8.500.000.000	8.569.424.087	100,82	Sangat Efektif
Rata-Rata				90,57	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa efektifitas penerimaan pajak hiburan Kota Bandar Lampung terbesar yaitu pada tahun 2017 dengan target 8.500.000.000 dengan realisasi 8.569.424.087 yang brarti sangat efektif. Untuk tahun 2016 diketahui target 7.700.000.000 dengan realisasi 6.962.370.443 yang brarti efektif. Sedangkan tahun 2015 diketahui target 7.199.999.464 denagn realisasi 5.794.133.258 yang brarti cukup efektif, yang rata-rata penerimaan pajak hiburannya yaitu 90,57% dan termasuk kriteria efektif.

Selanjutnya dapat diketahui kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD**

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1.	2015	5.794.133.258	367.151.254.980	1,58	Sangat kurang
2.	2016	6.962.370.443	394.637.483.196	1,76	Sangat kurang
3.	2017	8.569.424.087	397.547.362.856	2,16	Sangat

					kurang
Rata-Rata				1,83	Sangat kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat kurang, walaupun tiap tahunnya ada peningkatan namun itu belum cukup efektif dalam menyumbang PAD, seperti pada tahun 2015 realisasi pajak hiburan yaitu sebesar 5.794.133.258 dan realisasi PAD sebesar 367.151.254.980 itu berarti pajak hiburan hanya berkontribusi sebesar 1,58% dan tergolong kedalam kriteria sangat kurang. Begitu pula di tahun 2016, mengalami sedikit peningkatan namun tetap saja masih tergolong kedalam kriteria sangat kurang yaitu realisasi pajak hiburan 6.962.370.443 dan realisasi PAD 394.637.483.196 yang berarti hanya berkontribusi sebesar 1,76%. Dan di tahun 2017 realisasi pajak hiburan sebesar 8.569.424.087 dengan realisasi PAD sebesar 397.547.362.856 yang berarti berkontribusi sebesar 2,16% dan masih tergolong dalam kriteria sangat kurang.

#### **D. Pengembangan Pariwisata Kota Bandar Lampung**

##### **1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Bandar Lampung**

**Tabel 10**  
**Program Pengembangan Destinasi pariwisata**  
**di Kota Bandar Lampung**

No	Program	Kegiatan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Program pengembangan pariwisata	a. Rehab sarana dan prasarana Batu Putu.			✓		

		b. Pelestarian satwa objek wisata.			✓	✓	✓
		c. Pemeliharaan /rehab peninggalan sejarah.				✓	
		d. Pemeliharaan dan pengembangan pasar seni enggal.				✓	✓

## 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam Pengembangan Pariwisata

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 11**

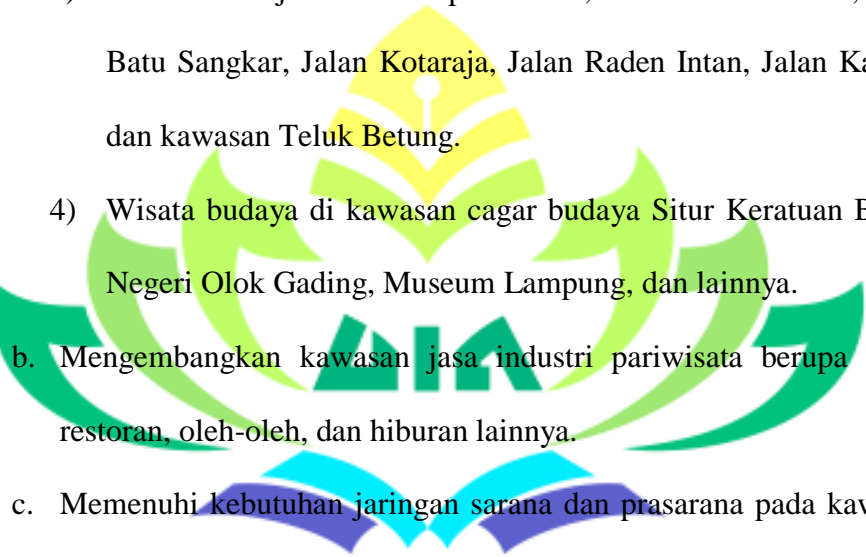
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung  
dalam Pengembangan Pariwisata**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi wisata di Kota Bandar Lampung.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.	a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung. b. Lama tinggal wisatawan di Kota Bandar Lampung. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme SDM pariwisata.
2.	Meningkatkan pengembangan industri dan pemasaran wisata melalui kreatifitas seni dan budaya.	a. Bertambahnya jumlah industri pariwisata. b. Bertambahnya even promosi wisata seni dan budaya berskala nasional maupun internasional.	a. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD kota Bandar Lampung. b. Meningkatkan pengembangan industri pariwisata. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi melalui seni dan budaya

**3. Pengembangan Pariwisata di Kota Bandar Lampung**

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berupa arahan pengembangan kawasan pariwisata Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Membagi kawasan wisata, yaitu:

- 
- 1) Wisata alam di kawasan Batu putu, Sukadanaham dan Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (TAHURA WAR).
  - 2) Wisata bahari di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, khususnya di kawasan sekitar Gunung Kunyit, Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Timur (sesuai dengan rencana zonasi pesisir Kota Bandar Lampung).
  - 3) Wisata belanja di sekitar pusat kota, Jalan Ahmad Yani, Jalan Batu Sangkar, Jalan Kotaraja, Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan kawasan Teluk Betung.
  - 4) Wisata budaya di kawasan cagar budaya Situr Keratuan Balau, Negeri Olok Gading, Museum Lampung, dan lainnya.
- b. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, dan hiburan lainnya.
  - c. Memenuhi kebutuhan jaringan sarana dan prasarana pada kawasan wisata.
  - d. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata. Diperlukan studi khusus untuk mengembangkan industri kreatif di Kota Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Dirmansyah selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa “wisata adalah salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah. Perkembangan sektor industry, akomodasi di kota Bandar Lampung



termasuk hotel, restoran, café, pusat hiburan berkembang disini (di Kota Bandar Lampung). Itu sebagian akses dari mudahnya investasi perizinan yang diberikan, sehingga potensi sektor pariwisata dikota Bandar lampung itu cukup besar. Kalau dilihat dari potensi alam, Bandar Lampung terbagi menjadi 3 wilayah, ada pantai, daratan, dan perbukitan yang cukup berkembang. Terkait dengan perkembangan destinasi, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata selalu melakukan pembinaan untuk masyarakat sadar wisata dalam rangka menciptakan sapta pesona, agar mengembangkan ekonomi masyarakat disekitar destinasi wisata. Kalau untuk destinasi wisata syariah, belum memisahkan antara wisata syariah dan non syariah karena sebetulnya wisata itu memang wisata yang baik halal, karena kita tidak mengembangkan wisata yang tidak baik”.<sup>72</sup>

Terdapat faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bandar Lampung seperti dijelaskan oleh bapak Ahmad Faizol dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa “faktor kunjungan wisatawan yang pertama yaitu kondusivitas daerah, orang datang kalau daerahnya aman, dan adanya promosi wisata yang dilakukan melalui sosmed agar viral yang menimbulkan banyak orang yang akan datang. Kalau dikota, lebih pada meeting, entertaint yang dilakukan dihotel-hotel, museum ataupun seminar itu bagian dari wisata, yang mendatangkan orang yang tercatat dalam kunjungan wisata. Dalam

---

<sup>72</sup> Dirmansyah, Sekretaris Dinas Pariwisata, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 12 April 2019.

setengah semester tahun 2019 ini, peningkatan jumlah wisatawan di Kota Bandar Lampung cukup meningkat, walaupun kemarin terjadi tsunami namun tetap tidak berpengaruh secara signifikan”, tuturnya.<sup>73</sup>

#### E. Analisis SWOT

	<b>Strengths (S):</b>	<b>Threats (T):</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi wisata.</li> <li>2. Mudah nya perijinan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dalam kegiatan wisata.</li> <li>3. Kota Bandar Lampung memiliki destinasi wisata yang beranekaragam yang menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai tujuan utama wisata di provinsi Lampung.</li> </ol>	<p>Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata masih sangat rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pariwisata baik kualitas maupun kuantitas yang mempunyai daya saing tinggi.</li> <li>2. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan yang menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya, dan pemasaran</li> <li>3. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata serta belum tersedianya moda transportasi yang menuju objek wisata (city tour).</li> <li>4. Kurang dan belum tersedianya peraturan daerah dan fasilitas studi yang menjadi pedoman dalam</li> </ol>

<sup>73</sup> Ahmad Faizol, Kepala Bidang pengembangan Destinasi Wisata, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 12 April 2019.

		pelaksanaan kepariwisataan.
<b>Opportunities (O):</b>  1. Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata.  2. Pariwisata dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat sekitar.  3. Berkembangnya industri restoran, rumah makan, kantin dan sejenisnya.  4. Bandar Lampung adalah pusat tujuan wisata di provinsi Lampung.  5. Industri pariwisata di Kota Bandar Lampung memiliki potensi untuk dapat dikembangkan secara maksimal.	<b>Strengths Opportunities (SO):</b>  1. Membangun dan memperbaiki sarana dan pemeliharaan prasarana wisata. 2. Mengadakan akomodasi pariwisata 3. Mengembangkan atraksi wisata. 4. Membangun dan mengadakan aksesibilitas wisata.	<b>Weakness Opportunities (WO):</b>  1. Meningkatkan promosi dan memperbaiki program pengembangan lebih bagus untuk menarik pengunjung sehingga siap untuk menghadapi persaingan antar objek wisata. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk menanamkan modal 3. Melakukan pemberdayaan, penyuluhan agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sadar wisata.
<b>Threats (T):</b>  1. Persaingan pariwisata yang ditawarkan oleh daerah sekitar semakin tajam.  2. Keadaan budaya masyarakat Lampung	<b>Strengths Threats (ST):</b>  1. Mengoptimalkan potensi alam dan keunikan objek wisata dengan mempertahankan dan pemeliharaan objek wisata secara berkesinambungan untuk menghadapi persaingan antar	<b>Weakness Threats (WT):</b>  1. Peningkatan kualitas tenaga kerja profesional dalam pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata secara berkesinambungan sehingga mengurangi kerusakan

yang belum dapat menjadi daya tarik wisatawan.	objek wisata.	lingkungan akibat pengembangan yang seenaknya.
3. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam menciptakan kekhasan Lampung sehingga belum dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandar Lampung.	2. Pengembangan dan pembangunan objek wisata yang ramah lingkungan dengan melakukan kontrol yang tegas terhadap pelaku wisata yang tidak sesuai, yang dapat mengancam kerusakan objek wisata.	2. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang telah ada dilokasi objek wisata.



#### BAB IV

## ANALISIS DATA

### A. Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar

#### Lampung

Menurut Nuryanti, pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching and adjustment* yang terus menerus antara *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Dirmansyah selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung diketahui bahwa pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berupa arahan pengembangan kawasan pariwisata Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

a. Membagi kawasan wisata, yaitu:

- 1) Wisata alam di kawasan Batu putu, Sukadanaham dan Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (TAHURA WAR). Batu Putuk memiliki potensi wisata alam cukup bagus jika dikembangkan dengan baik, karena kealamiahan dikawasan tersebut masih terjaga. Pengelolaan dan perawatan lahan di Batu Putuk oleh Dinas Pariwisata masih diserahkan kepada penjaganya atau masyarakat disekitar kawasan tersebut. Kawasan Batu Putuk merupakan kawasan ekowisata, terdapat kali/sungai yang masih dijaga kealamiahan bibit airnya, pemadatan sungai yang dibuat

untuk kegiatan arum jeram, dan terdapat pemandian seperti air terjun. Selain itu, lahan di kawasan Batu Putuk potensial apabila dibangun destinasi wisata semacam central park atau wisata modern seperti waterboom. Namun pada kawasan tersebut, obyek wisata yang sudah ada belum ditarik retribusinya oleh pemerintah karena tidak ada pendapatan daerahnya.

- 2) Wisata bahari di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, khususnya di kawasan BWK G sekitar Gunung Kunyit, Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Timur (sesuai dengan rencana zonasi pesisir Kota Bandar Lampung).

Pariwisata Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh pemerintah salah satunya wisata bahari yang berada di kawasan Gunung Kunyit, akan tetapi sampai saat ini masih dalam tahap penataan persiapan administrasi lahan dan penataan pesisir pantai. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan pesisir pantai akan membangun Dermaga Yakh yang merupakan dermaga untuk mempercepat jarak tempuh ke Jakarta tanpa harus ke Pelabuhan Panjang. Potensi wisata di Gunung Kunyit cukup banyak manfaatnya, namun saat ini pengelolaan obyek wisata yang ada masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang sejak lama memiliki tanah di kawasan Gunung Kunyit tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata

selain mengelola lahan, pemerintah juga menstimulan tempat bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi obyek wisata untuk membangun usaha dengan memanfaatkan potensi wisata di kawasan Gunung Kunyit. Dalam hal tersebut pemerintah memberikan himbauan bagi masyarakat yang mengelola obyek wisata bahari di kawasan Gunung Kunyit agar lebih baik dalam pengelolaannya dengan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, kemudian selalu bersikap ramah kepada pengunjung agar hal tersebut mampu menarik minat wisatawan, dan akan berdampak baik pada pembangunan daerah.

- 3) Wisata belanja di sekitar pusat kota, Jalan Ahmad Yani, Jalan Batu Sangkar, Jalan Kotaraja, Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan kawasan Teluk Betung.

Kota Bandar Lampung selain memiliki potensi wisata alam atau bahari juga memiliki wisata belanja karena Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pusat perdagangan di Provinsi Lampung. Akan tetapi pengelolaan pusat-pusat perbelanjaan yang ada saat ini dikelola oleh pihak swasta ataupun dikelola secara mandiri, pemerintah hanya mengelola surat izin usaha bagi masyarakat yang akan membangun sebuah usaha yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata.

- 4) Wisata budaya di kawasan cagar budaya Situr Keratuan Balau, Negeri Olok Gading, Museum Lampung, dan lainnya.



Pengembangan pariwisata Kota Bandar Lampung masih fokus pada wisata budaya yaitu pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah di beberapa daerah Kota Bandar Lampung seperti makam raja-raja Lampung, rumah-rumah adat Lampung yang masih dilestarikan dan murni masih ditempati serta aktivitas budaya yang kental dengan ciri khas pola makan, pola asuh, lalu perilaku dan hal itu merupakan aset budaya daerah yang perlu dijaga kelestariannya. Selain itu, Dinas Pariwisata menggalakan pemutaran lagu daerah Lampung di setiap pusat tempat jasa usaha pariwisata seperti hotel, restoran, atau tempat terbuka untuk meninggalkan kenangan bagi wisatawan dan menerapkan live music dengan menggunakan Cetik Gamolan Lampung serta alat musik tradisional lain pada setiap event. Selain itu, Dinas Pariwisata menghimbau kepada pelaku usaha untuk memasang ornamen Lampung seperti siger, serta pemakaian perlengkapan usaha dengan motif tapis.

- b. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, dan hiburan lainnya.

Pemerintah saat ini fokus pengembangan dengan meningkatkan jasa industri pariwisata, karena hal tersebut merupakan penyokong utama peningkatan kontribusi dari sektor pariwisata Kota Bandar Lampung berupa akomodasi hotel, rumah makan/restoran, tempat hiburan dan perdagangan produk. Dari sektor hotel misalnya, para wisatawan lokal

maupun mancanegara tentu saja memerlukan tempat penginapan sementara saat melakukan kegiatan wisata apabila mereka datang dari luar daerah Kota Bandar Lampung. Hotel dapat memberikan efek penting bagi perkembangan daerah, selain sebagai bentuk jasa pemenuhan akomodasi wisata daerah. Begitupun sektor rumah makan, para wisatawan tentu akan membutuhkan konsumsi selama melakukan kegiatan wisatanya seperti yang kita ketahui bahwa kuliner pada setiap daerah tentu saja berbeda dan memiliki ciri khas yang berbeda pula pada setiap daerahnya, sama halnya dengan berbagai macam kuliner khas Kota Bandar Lampung.

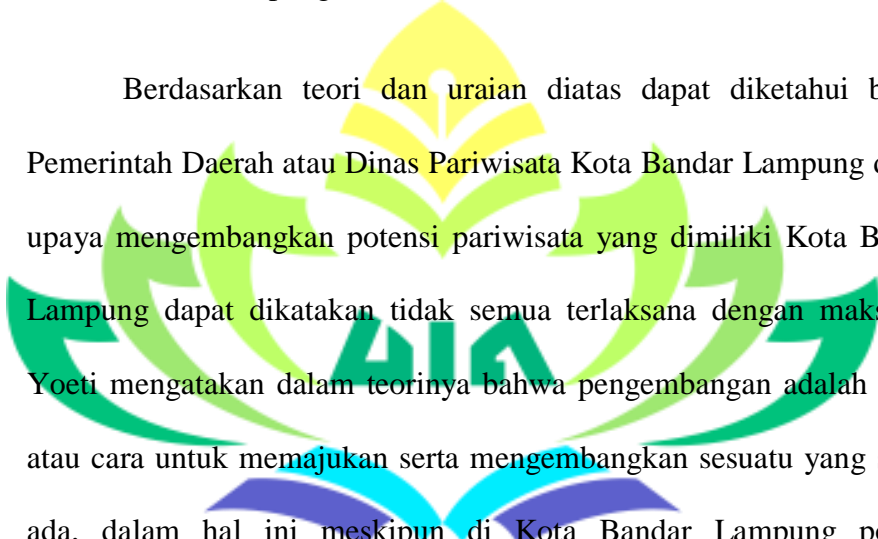
- c. Memenuhi kebutuhan jaringan sarana dan prasarana pada kawasan wisata.

Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mendukung kelancaran pariwisata. Sarana dan prasarana pariwisata Kota Bandar Lampung sudah cukup baik dan lengkap seperti perhubungan jalan, pembangkit listrik dan penyedia air bersih, sistem telekomunikasi, pelayanan kesehatan maupun keamanan, serta tersedianya akomodasi perhotelan/penginapan, rumah makan/restoran, sarana pusat oleh-oleh, dan berbagai macam sarana hiburan. Namun sarana dan prasarana pada objek wisata tidak semua disediakan oleh pemerintah, akan tetapi disediakan oleh pengelola objek wisata itu sendiri. Misalnya pada kawasan wisata Batu Putuk, Dinas Pariwisata hanya menyediakan sarana penunjang berupa musholla, ruang ganti

atau toilet umum, serta perbaikan prasarana berupa akses jalan. Penyediaan sarana fasilitas standar tersebut tidak hanya semata-mata diperuntukan untuk menunjang kegiatan wisatawan, namun juga agar dipelihara dan diperbaiki oleh masyarakat yang tinggal dekat dikawasan Batu Putuk tersebut.

d. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata.

Seperti kerajinan tangan berupa souvenir khas Lampung, industri kuliner khas Lampung dan lain-lain.



Berdasarkan teori dan uraian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki Kota Bandar Lampung dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Yoeti mengatakan dalam teorinya bahwa pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada, dalam hal ini meskipun di Kota Bandar Lampung potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak akan tetapi objek wisata di Kota Bandar Lampung belum ada yang dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah atau Dinas Pariwisata. Itulah yang menyebabkan pajak hiburan belum dapat berkontribusi secara maksimal dalam pendapatan asli asli daerah karena belum banyak destinasi wisata yang ditarik pajaknya oleh pemerintah.

Pengembangan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas

Pariwisata tidak berupa pembangunan secara fisik pada objek wisata yang sudah ada, atau memperbaiki dan menata ulang seluruh tempat objek wisata, dan atau seperti membangun sarana dan prasarana pariwisata. Meskipun sarana pariwisata di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan teori diatas yaitu berupa sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata, akan tetapi dari keseluruhan sarana tersebut belum ada yang dikelola dan dikembangkan secara khusus oleh Dinas Pariwisata, begitupun dengan prasarana pariwisatanya. Pengembangan dan pengelolaan objek wisata baik sarana atau prasarananya yang ada saat ini banyak dikelola secara pribadi oleh masyarakat, dan hasil dari pendapatan objek wisata tersebut belum ada yang ditarik retribusinya oleh pemerintah. Dinas pariwisata saat ini memfokuskan pengembangan pariwisata dengan pelestarian kesenian daerah, penyediaan lahan objek wisata, dan jasa industri pariwisata yang diharapkan dapat menunjang bagi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut bukan berarti potensi pariwisata yang ada terbengkalai, namun kendala dalam pengembangan ini adalah karena keterbatasan dana yang ada dan pembangunan di bidang pariwisata Kota Bandar Lampung masih dilakukan secara bertahap.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Ahmad Faizol, selaku kepala pengembangan destinasi wisata menyatakan bahwa

faktor kunjungan wisatawan yakni kondusivitas daerah, jadi apabila destinasi wisata dikelola dengan baik dari segi lokasi, maka wisatawan akan datang jika daerah tersebut aman. Kemudian adanya promosi wisata yang dilakukan melalui sosial media, hal tersebut sangatlah berdampak pada kunjungan wisatawan karena dengan viralnya destinasi yang di publish akan menimbulkan banyak orang yang akan mengunjungi tempat tersebut. Dan data setengah semester tahun 2019 ini, peningkatan jumlah wisatawan di Kota Bandar Lampung cukup meningkat, walaupun sempat terjadi tsunami namun tetap tidak berpengaruh secara signifikan pada destinasi wisata yang ada disini.<sup>74</sup>

#### **B. Kendala dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung**

Kendala atau permasalahan yang sering timbul dari pengembangan pariwisata menurut dinas pariwisata yaitu

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata baik kuantitas maupun kualitas yang mempunyai daya saing tinggi. Hal ini menyebabkan sulitnya pariwisata di Kota Bandar Lampung untuk berkembang karena pengelola kurang memiliki pengetahuan tentang pariwisata itu sendiri sehingga dalam pengelolaan pengembangannya kurang tepat sasaran. Contohnya seperti tempat wisata di Batu Putu, apabila di kawasan tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal maka akan dapat menghasilkan pendapatan dan juga

---

<sup>74</sup> Ahmad Faisol, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung pada 12 April 2019.

menghidupkan industri kuliner, souvenir dan lainnya.

2. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan yang menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya, dan pemasaran. Hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (*length of stay*) dan pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) di Kota Bandar Lampung. Dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan. Budaya sendiri memiliki peran penting dalam mempengaruhi kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung. Hanya saja budaya di Kota Bandar Lampung sendiri belum mampu menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di Kota Bandar Lampung. Seperti budaya Tari Barong khas Bali yang dikemas menjadi atraksi budaya yang menjadi ciri khas Bali dan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan atraksi-atraksi Tari Barong.
3. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata serta belum tersedianya moda transportasi yang menuju objek wisata (*city tour*) hal ini mengakibatkan kesulitan bagi wisatawan yang datang maupun bagi pelaku usaha. Belum tersedianya fasilitas yang memadai di destinasi wisata Kota Bandar Lampung menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan pariwisata di tempat lain. Ditambah lagi sulitnya moda transportasi untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata yang menyebabkan sulitnya

pelaku usaha untuk berkembang di sekitar kawasan wisata. Seperti dikawasan Batu Putu, belum adanya industri yang berkembang disana seperti industri kuliner dan souvenir dan lainnya.

4. Kurang dan belum tersedianya peraturan daerah dan fasilitasi studi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kepariwisataan. Hal ini mengakibatkan pengembangan pariwisata tidak terencana dengan baik. Belum adanya kebijakan-kebijakan dari pihak terkait tentang pelaksanaan kepariwisataan menyebabkan kurangnya pelayanan dari penyedia destinasi wisata terhadap wisatawan. Seperti belum tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata bagi wisatawan, kurangnya etika masyarakat dalam melayani wisatawan, belum adanya aturan tentang standar pelayanan yang baik bagi wisatawan. Seperti halnya apabila kita berkunjung ke Yogyakarta, masyarakat disana sangat *welcome* dengan para wisatawan yang berkunjung kesana. Mereka menyadari bahwa kunjungan wisatawan di kota mereka akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan pendapatan daerah di kota tersebut.

### **C. Solusi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata**

Dalam berbagai kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata di Kota Bandar Lampung, Dinas Pariwisata Kota Bandar memiliki beberapa program guna menjadi solusi dari kendala-kendala tersebut. Diantaranya:

1. Pendidikan dan pelatihan SDM bidang kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan SDM diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan dan pengembangan pariwisata dapat terlaksana secara maksimal.
2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan aksesibilitas destinasi wisata. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dari kendala sulitnya wisatawan dalam menjangkau destinasi wisata. Sehingga dapat menarik minat wisatawan agar berkunjung ke Kota Bandar Lampung karena bagus kualitas dan kuantitas atraksi wisata dan destinasi wisata yang disediakan dan mudahnya jangkauan ke tempat-tempat wisata yang diinginkan.
3. Melakukan pengembangan, promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui even promosi baik seni maupun budaya. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata baik alam maupun budaya sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung dan lama menetap di Kota Bandar Lampung sehingga dapat menjadi sumber pendapatan dan membuka lapangan usaha bagi industri kuliner, souvenir, dan lain sebagainya.



#### D. Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### Kota Bandar Lampung perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri “syariah”. Pariwisata adalah salah satu sarana untuk mengembangkan konsep ekonomi islam yang diambil dari Al-Quran. Allah telah memberikan isyarat manusia untuk melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan serta memberikan motivasi. Dengan gerakan ini setidaknya bisa membuka jalan untuk pengembangan syariah.

Dalam surat Al-Ankabut ayat 20 Allah meminta agar kita merenungi keindahan ciptaan nan agung Allah SWT agar dijadikan sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup manusia.<sup>75</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al Ankabut: 20)<sup>76</sup>

Berdasarkan ayat diatas adalah manusia sebagai khalifa di bumi untuk “berjalanlah dimuka bumi” dengan maksud Allah mengingatkan

<sup>75</sup> Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Alquran), *Jurnal Human Falah*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 141.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), h. 398.

kita kepada alam ciptaan Allah, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam ini dengan kekhasan yang berbeda. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan haruslah dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Chukaew terdapat 8 faktor standar indikator pengukuran pariwisata syariah yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

Di Kota Bandar Lampung sendiri pelayanan kepada wisatawan belum semuanya sesuai dengan prinsip Islam secara keseluruhan.

- b. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.

Dalam memandu wisatawan, pemandu dan staff berperan penting dalam mengarahkan dan memberikan informasi terkait dengan pariwisata. Untuk itu, pemandu harus paham terkait disiplin dan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugasnya. Seperti menginformasikan waktu sholat dan arah kiblat, memberitahukan tempat makan halal dan lain sebagainya. Di Kota Bandar Lampung sendiri pemandu wisata masih sangat terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas yang mempunyai daya saing tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya spesialisasi profesi pemandu wisata syariah.

- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam wisata syariah, kegiatan yang dilakukan haruslah sesuai dengan prinsip Islam. Seperti tidak melakukan kegiatan ketika datang waktu sholat, tidak mengonsumsi makanan dan minuman haram selama menjalankan kegiatan berwisata dan lain sebagainya. Di kota bandar lampung sendiri telah menyediakan tempat-tempat ibadah di kawasan wisata dan telah menyediakan restoran-restoran halal bagi wisatawan.

- d. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.

Islam sangat memperhatikan kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kehalalan yang dimaksud baik dari segi sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu, minat wisatawan dalam makanan memainkan peran penting dalam memilih tujuan wisata. Di Kota Bandar Lampung sendiri semua rumah makan mengolah dan menyediakan makanan halal. Walaupun tidak semua rumah makan mencantumkan label halal.

- e. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.

Untuk kenyamanan wisatawan dalam bertransportasi, keamanan adalah hal yang harus diperhatikan. Karena jika keamanan suatu wilayah kurang diperhatikan, maka wisatawan akan enggan berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Seperti pada QS Saba' ayat 18 dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya yang dilimpahi keberkatan, keindahan, sehingga dianjurkan bagi manusia

untuk melakukan perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyamanan, keberagaman dengan rasa aman.

- f. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.

Kenyamanan wisatawan muslim dalam berwisata sangat diperhatikan seperti menyediakan tempat ibadah di kawasan wisata. Di Kota Bandar Lampung sendiri hampir semua kawasan wisata telah disediakan tempat untuk melakukan ibadah bagi wisatawan muslim.

- g. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Lokasi pariwisata yang disediakan di Kota Bandar Lampung merupakan yang diperbolehkan dalam kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.

Objek dari wisata syariah tidak harus tempat-tempat yang islami saja, namun semua tempat yang tidak bertentangan dengan Islam. Pantai, gunung bahkan budaya lokal dapat saja menjadi destinasi wisata syariah. Pariwisata syariah mempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan wisata religi. Wisata religi didefinisikan sebagai wisata dalam kerangka kepentingan ibadah/agama misalnya haji, umroh, dan berziarah ke makam wali atau tokoh agama. Sedangkan wisata syariah adalah semua kegiatan dan objeknya tidak melanggar aturan Islam.

Dalam sistem pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak (WP) yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.

Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan “*Adh-Dhariibah*” yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Dan menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Tidak ada ketentuan syar’i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, yang mengatur pajak secara langsung. Yang ada hanya *Atsar* para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, yaitu sejak Khalifah Umar bin al-Khattab. Itupun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga Negara non-Muslim yang menggarap tanah Negara.

Di dalam hukum Islam, dasar kewajiban membayar pajak (*dharibah*) adalah At-Taubah ayat 29:

Artinya: “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak*

*mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 'Jizyah' dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah: 29).*

Ayat tersebut di atas hanya membebankan *jizyah* (pajak perlindungan) terhadap orang non-muslim baik kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mampu yang mendapat perlindungan di negara muslim. Sedangkan orang yang tidak mampu dibebaskan dari beban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangan mereka.

Pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah:

1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain.

Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila Negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan didukung oleh beberapa ulama dan mereka mensyaratkan bahwa pajak boleh dipungut jika benar-benar kas Negara kosong.

2. Pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada

pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
4. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli.

Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan. Selain itu, prinsip keadilan juga untuk mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak Wajib Pajak (WP) di satu sisi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Dan prinsip itu ternyata sudah diterapkan oleh Islam dalam mekanisme pemungutan zakat sejak ajaran itu disyariatkan. Ada empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadilan, ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam karena Islam menuntut adanya keadilan dalam segala hal.

- b. Kepastian, pengetahuan para subjek pajak tentang kewajibannya hendaklah pasti, tidak boleh ada keraguan sedikitpun karena ketidakpastian dalam sistem pajak sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.
- c. Kelayakan, inti dari prinsip ini adalah menjaga perasaan Wajib Pajak (WP) dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Dalam zakat, prinsip ini sudah mendapat perhatian seperti, Rasulullah pernah menyuruh tukang taksir (Awamil al-Khirsh) agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.
- d. Faktor ekonomis, maksudnya adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat. Telah diceritakan bagaimana para petugas zakat berangkat untuk mengumpulkan zakat, kemudian langsung dibagikan kepada para mustahik. Sehingga ketika para petugas zakat pulang, maka mereka tidak membawa apa-apa lagi. Jatah untuk para amil (petugas zakat) di batasi maksimal 12,5 persen saja.



Dari uraian diatas diketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari sektor pariwisata Kota Bandar Lampung adalah pajak perhotelan, pajak hiburan dan pajak akomodasi. Dalam pandangan islam, pendapatan yang bersumber dari pajak harus memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan dalam islam diantaranya prinsip keadilan, kepastian, kelayakan, dan faktor ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjahya Supriatna yang menyatakan bahwa penetapan pajak daerah sebisa mungkin memenuhi kriteria-kriteria diataranya keadilan,efisiensi, kemampuan administratif, dan kriteria lainnya.

Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Dirwansyah selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pariwisata syariah itu sendiri adalah pariwisata yang konsepnya tidak melanggar nilai-nilai dan etika syariah berhubungan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan dan haram berarti dilarang. Namun, pak Dirwansyah menggaris bawahi, belum adanya label Pariwisata Syariah di Kota Bandar Lampung bukan berarti pariwisata tersebut tidak sesuai dengan syariat islam, hanya saja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sendiri belum memisahkan pariwisata konvensional dengan pariwisata syariah. Sesuai dengan teori Sofyan yang menyatakan bahwa wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO)

konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata di Kota Bandar Lampung yaitu melalui program-program rehab sarana dan prasarana Batu Putu, pelestarian satwa objek wisata, pemeliharaan/rehab peninggalan sejarah, pemeliharaan dan pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi wisata di Kota Bandar Lampung, yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung.
2. Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung perspektif Ekonomi Islam.

Pariwisata Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu melalui pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak akomodasi. Dalam pandangan islam, sumber pendapatan melalui pajak sendiri belum ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, yang mengatur pajak secara langsung.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas mengenai penelitian ini maka penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Untuk Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung: agar dapat memaksimalkan kinerja supaya dapat mencapai bahkan melampaui target kinerja setiap tahunnya dan terus dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.
2. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan mampu meneliti pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memilih atau menambahkan variabel lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Luh Sili, *Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Vol. 3 edisi Agustus 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006)
- Ayubi H, Humaidi Al, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani*, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Badan Pusat Statistik Lampung, *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2017*, (Lampung: Badan Pusat Statistik)
- Badrudin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV*, (Jakarta: Gramedia, 2011)
- Dimyanto, Ahmad, *Usaha Pariwisata*, (Jakarta, 2003)
- Dinaspariwisata.lampungprov.go.id diakses pada 25 Januari 2019 pukul 19.45 WIB
- Eko, Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintah Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Firdausy, Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefanus Pani Rengu, *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002)
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004)

- Hanbali, Muhammad, Tujuan Ekonomi Islam. Dialetika, 2013.  
<http://marx83.wordpress.com/2008/11/30/tujuan-ekonomi-islam-2/>,  
diakses pada 23 April 2019
- Hanief, Shofwan, dan Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi*, (Yogyakarta: IKAPI)
- \_\_\_\_\_, Haidar Tsany, Dkk., *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta*
- Hidayat, Marceilla, *Strategi Perencanaan Pengembangan Objek Wisata*, Tourism and Hospitality Essentials (THE) journal, Vol. 1, No. 1, 2001
- Indrianto, Nur, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2009)
- Jessy, Tiara Apriani, *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Paariwisata*, Jurnal Administrasi Negara Vol.5 No.3
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)* <https://www.kbbi.web.id>, diakses pada 9 April 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)* <https://www.kbbi.web.id/usaha>, diakses pada 9 april 2019
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008)
- Masyuri dan Zainudin, *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Adutama, 2008)
- Mulya, Carunia, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obir Indonesia, 2018)
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012)
- Nugraha, Yudi Martha, *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E - Marketing di Kepulauan Riau*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p): 0853-7720, ISSN (e): 2541-4275
- Tjahjono, Heri, *Analisis Potensi dan Masalah Pariwisata di Kelurahan Kandri*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 37, No 2 Desember 2010

Nyoman, Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2002)

Pradikta, Angga, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*, November 2013

Purwanti, Novi Dwi dan Retno Mustika Dewi, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*, 2014

Putri, Rezi Kurnia, *Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, April 2015

RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021

Ridwan, Murtadho, *Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara*

*Muslim*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF Vol. 1 No. 01, Juni 2015

Sari, Nur Indah Kurnia, *Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)*, 2014

Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suhada, Bambang dan Superda A.Masyono, *Strategi Pengembangan Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Lampung Timur*, ISSN Cetak 1978 – 6573/ ISSN Online: 2477 - 300x DERIVATIF Vol. 9 No. 1, April 2015

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993)

Suryadana, M. Liga dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Syahriza, Rahmi, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Alquran)*, Jurnal Human Falah, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014)

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 3 & 4

Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Dan Retribusi, (Jakarta: Fokus Media, 2009)

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Yoeti, H. Oka. A., *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, (Jakarta: Pertja, 1999)

